

ABSTRAK

KURNIA GANDA PUTRI NASUTION*

Narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di koran, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui : pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu yang belaku di Indonesia, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu serta pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1866 K/Pid.Sus/2021.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.

Disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai untuk memberantas narkotika adalah Undang-Undang Narkotika Pasal 7 Menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan Narkotika jenis sabu-sabu, Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan. Ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak. Penulis sangat setuju dengan pertimbangan majelis hakim karena terhadap suatu putusan yang sudah dikabulkan dalam tingkat banding berarti majelis hakim setuju dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Memperjual Belikan, Ciu, Cukai

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

KURNIA GANDA PUTRI NASUTION*

Narcotics in Indonesia are nothing new, in fact almost every day in newspapers, television and other media. There is news that discusses narcotics, starting from abuse, the arrest of a dealer and even addicts who are undergoing the rehabilitation process.

The problems in this research are to find out: the legal regulations for perpetrators of criminal acts without the right to trade methamphetamine-type narcotics that apply in Indonesia, the imposition of sentences against criminal offenders without the right to trade methamphetamine-type narcotics and the judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts without rights. trafficking crystal methamphetamine in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1866 K/Pid.Sus/2021.

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials."

It is concluded that the legal basis used to eradicate narcotics is the Narcotics Law Article 7 which states that narcotics can only be used for health services and/or the development of science and technology. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 2 of 2017 concerning Changes to the Classification of Narcotics. The use of narcotic substances is only permitted for medical purposes under the supervision of a doctor and also for research purposes. The imposition of sentences on perpetrators of criminal acts without the right to trade in narcotics of the type of crystal methamphetamine, the law enforcement process can run effectively if a chain of several processes is formed that cannot be separated. It turns out that the *Judex Facti* decision in this case does not conflict with the law and the statutes, so the cassation application is declared rejected. The author strongly agrees with the considerations of the panel of judges because for a decision that has been granted at the appeal level, it means that the panel of judges agrees with what the public prosecutor demands.

Keywords: Accountability, Buying and Selling, Ciu, Excise

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara